





KICK OFF MEETING

TASK FORCE KEUANGAN BERKELANJUTAN

Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisioner OJK

Jakarta, 5 Oktober 2021

KOMITMEN INDONESIA UNTUK PARIS AGREEMENT



Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement ke dalam **UU No. 16/2016** tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change.



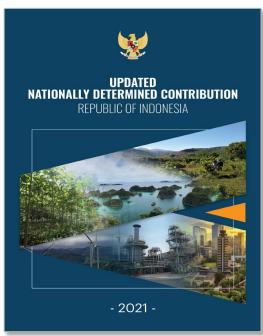
Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK dari level Business as Usual pada tahun 2030 sebesar:

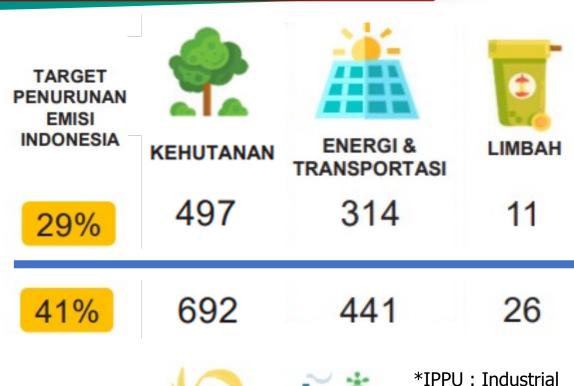
29% melalui upaya nasional

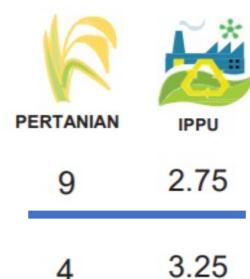
41% dengan dukungan internasional

Tindak Lanjut Indonesia









Processes and Product Use

(Sumber: Updated NDC 2021)

Climate Change

Kerja Sama Bilateral melalui Task Force on Climate Change







Dalam rangka mencapai target NDC sesuai tujuan *Paris Agreement*, Indonesia dan Amerika Serikat akan bekerja sama dengan membentuk *Task Force on Climate Change* yang melibatkan kedua negara.

Steering Committee

Chair: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Vice Chair: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan

Working Committee

Chair: Wakil Menteri Luar Negeri

Vice Chair: Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Secretary: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan *Liason*: Penasehat Khusus Menko Maritim Bidang Iklim

Working Group 1

Envisioning Climate Ambition toward Net zero Emission

Chair: Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim –
Kementerian LHK

Working Group 2

Natural Capital and Ecosystem Services: Land Use, Forestry, Mangroves, and Ocean

Chair: Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan – Kementerian LHK

Working Group 3

Renewable Energy and Energy Transition for People's Well Being

Chair: Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Kementerian ESDM

Working Group 4 Sustainable and Blended Finance for Our Common Future

Chair: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – Kementerian Keuangan

Dukungan OJK dalam Task Force on Climate:

- 1. Kerja sama dengan USAID dalam rangka program pengembangan pilot project Bali Center for Sustainable Finance (BCSF) bersama Univ. Udayana.
- 2. Melakukan pengembangan skema inovatif untuk mendukung keuangan berkelanjutan.
- 3. Mendukung pembiayaan dengan skema Blended Finance di Indonesia.

OJK menjadi anggota di WG 4

DUKUNGAN OJK TERHADAP PENGEMBANGAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

- POJK No.51/2017 tentang
 Penerapan Keuangan
 Berkelanjutan bagi Lembaga
 Jasa Keuangan, Emiten, dan
 Perusahaan Publik.
- POJK No.60/2017 tentang
 Penerbitan dan Persyaratan
 Efek Bersifat Utang
 Berwawasan Lingkungan
 (Green Bond)
- Keputusan Dewan
 Komisioner Nomor 24
 Tahun 2018 Tentang Insentif
 Pengurangan Biaya Pungutan
 sebesar 25% dari Biaya
 Pendaftaran dan Pernyataan
 Pendaftaran Green Bond.
- d. Pada tahun 2020, OJK juga mengeluarkan pedoman dan kebijakan terkait insentif pembiayaan kendaraan listrik.

4 langkah strategis OJK untuk memastikan penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan yang efektif dan menangani isu-isu terkait iklim

Penyelesaian Taksonomi Hijau

- Taksonomi hijau sebagai pedoman dalam pengembangan produk-produk inovatif dan/atau keuangan berkelanjutan serta *sustainable financial disclosure*. Inisiatif ini juga sejalan dengan pengembangan regulasi mengenai pelaporan Industri Jasa keuangan ke OJK.
- OJK secara aktif ikut serta dalam Financial Stability Board, khususnya terkait sustainable financial disclosure untuk Lembaga Jasa Keuangan dalam Financial Stability Board -Workstream on Climate Disclosures/WSCD dan ASEAN Taxonomy Board.

Pengembangan kerangka manajemen risiko untuk IJK dan pedoman pengawasan berbasis risiko untuk pengawas dalam rangka menerapkan risiko keuangan terkait iklim.

 Dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko dimaksud, OJK secara aktif ikut serta dalam di Financial Stability Board - Working Group on Climate Risk/WGCR.

Pengembangan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan *feasible*.

Peningkatan awareness dan capacity building untuk seluruh stakeholders.

PEMBENTUKAN TASK FORCE KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pembentukan *Task Force* **Keuangan Berkelanjutan Sektor Jasa Keuangan** yang sejalan dengan Inisiatif Strategis OJK/2021 merupakan upaya untuk mempercepat proses pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Sektor Jasa Keuangan.

TUJUAN

- a. platform koordinasi SJK yang terintegrasi untuk ekosistem Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, termasuk keterlibatan dalam berbagai forum internasional;
- b. Mendukung peningkatan green
 financing dalam rangka
 pendalaman pasar Keuangan
 Berkelanjutan.

Memperhatikan isu *climate change* dan *sustainable finance* **telah menjadi perhatian global dan nasional**, IKBI perlu diperluas dengan menambah jumlah LJK (penambahan jumlah IKNB, dan keterlibatan LJK sektor Pasar Modal).

Hal ini juga antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa isu *carbon trading/carbon market* sedang dalam diskusi tahap akhir di Pemerintah. Hal ini pada akhirnya akan berimplikasi pada Sektor Jasa Keuangan.

Kedepannya, *Task Force* Keuangan Berkelanjutan diharapkan menjadi:

- forum koordinasi pengembangan Sustainable Finance bagi Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.
- forum diskusi atas perkembangan isu-isu yang menjadi pembahasan dalam fora-fora internasional lainnya yang secara spesifik telah mengangkat tema Keuangan Berkelanjutan (sustainable finance) dan permasalahan yang beberapa tahun terakhir perlu kita sikapi bersama mengenai climate related financial risk yang perlu disikapi oleh LJK.

DESIGN STRUKTUR TASK FORCE KEUANGAN BERKELANJUTAN

Tim Pengarah Ketua Dewan Komisioner OJK Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Direktur Utama LJK Direktur Utama BEI

Tim Pelaksana

Pejabat OJK (DKSK, DKB1, DKB3, DPM1, DKI1, DKHL)

Direksi LJK

Tim Teknis OJK

Tim Teknis LJK

Sekretariat

OJK GKKT

Daftar LJK yang telah memberikan konfirmasi:

A. Perbankan

- 1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- 2. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
- 3. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
- 4. PT Bank Tabungan Negara, Tbk
- 5. PT Bank Central Asia, Tbk
- 6. PT Bank Panin, Tbk
- 7. PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk

- 8.PT Bank OCBC NISP, Tbk.
- 9. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
- 10. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 11. PT Bank HSBC Indonesia.
- 12. PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.
- 13. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
- 14. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

B. Pasar Modal

Perusahaan Efek

- 1. PT Mandiri Sekuritas
- 2. PT Maybank Kim Eng Sekuritas
- 3. PT Phintraco Sekuritas
- 4. PT RHB Sekuritas Indonesia
- 5. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Manajer Investasi

- 1. Manulife Aset Manajemen Indonesia
- 2. Surya Timur Alam Raya
- 3. Panin asset management

Emiten

- 1. PT. Solusi Bangun Indonesia, tbk
- 2. PT Sidomuncul, Tbk
- 3. PT Barito Pacific Tbk
- 4. PT Indah kiat Tbk
- 5. PT Sinar Mas Agriculture Tbk
- 6. PT Medco Tbk
- 7. PT Multi Bintang Tbk

C. IKNB

Asuransi Umum

- 1. PT Jasindo
- 2. PT Reasuransi Maipark Indonesia
- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Indonesia Re)
- 4. PT Askrindo

IKNB Lainnva

5. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. PT Sarana Multigriya Finansial

Asuransi Jiwa

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia
 Manulife
- 2. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
- 3. PT Asuransi BRI Life
- 4. PT BNI Life Insurance
- 5. PT Prudential Life Assurance
- 6. PT AIA Financial

3. BPJS Ketenagakerjaan

4. BPJS Kesehatan

Dana Pensiun

- Dana Pensiun BCA
- 2. Dana Pensiun Telkom

Perusahaan Pembiayaan

- 1. PT Adira Dinamika Multi Finance
- 2. PT Indonesia Infrastructure Finance
- 3. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

DESIGN STRUKTUR TASK FORCE KEUANGAN BERKELANJUTAN

- 1. Tim Pelaksana akan dipecah lebih lanjut dalam beberapa working group dengan deliverables dan timeline yang akan ditentukan kemudian, antara lain:
 - a. Working Group Taksonomi Hijau dan Pelaporan
 - b. Working Group Climate-related Financial Risks Management
 - c. Working Group Carbon Trading

Deliverables dan timeline akan disesuaikan dengan pembahasan dalam fora internasional.

2. Tim Pengarah akan melakukan pertemuan minimal 3 bulan sekali untuk melakukan tracking pembahasan dalam Tim Pelaksana.

UPDATE PERKEMBANGAN PEMBAHASAN TAKSONOMI HIJAU

Urgensi Pengembangan Taksonomi Hijau di OJK

- 1. Kebutuhan standardisasi mengenai definisi dan kriteria hijau.
- 2. Kebutuhan monitoring secara berkala dalam implementasi penyaluran kredit /pembiayaan ke sektor hijau.
- 3. Antisipasi potensi *green washing* pelaporan yang dilakukan Industri Jasa Keuangan.

Saat ini OJK dalam proses finalisasi penyusunan Taksonomi Hijau (*green taxonomy*) yang merupakan **klasifikasi sektor** berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya **perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perlindungan iklim**.

Dalam proses penyusunan taksonomi hijau ini, OJK telah melibatkan 8 (delapan) Kementerian, yang mencakup 43 (empat puluh tiga) Direktorat Jenderal terkait untuk mengkonfirmasi batasan (*threshold*) kebijakan yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan sosial serta perkembangan teknologi terkini dalam masing-masing sektor/sub sektor.

Taksonomi Hijau yang dikembangkan saat ini, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan pada POJK No 60 tahun 2017 tentang *Green Bond* dengan *benchmarking* negara lain seperti EU taxonomy.

OJK telah mengklasifikasi sekitar 2.700 (dua ribu tujuh ratus) klasifikasi sektor dan subsektor yang perlu dipetakan secara detail dengan kebijakan/ketentuan/pedoman mengenai kriteria/batasan hijau atau tidak hijau dari kementerian teknis terkait, sehingga dapat dijadikan panduan yang jelas untuk mengelompokan aktifitas/kegiatan ekonomi yang hijau atau tidak hijau.

Pada gilirannya, Draft Taksonomi Hijau dimaksud akan ditransformasikan ke dalam pelaporan regular LJK ke OJK. Dengan demikian, maka LJK dan OJK secara bersama-sama dapat memahami dengan lebih baik aktifitas pembiayaan hijau dan pengelolaan risikonya.







TERIMA KASIH